



Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendorong Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di Indonesia: Pendekatan IPM

Maria Venantin Wago Toda, Anik Sri Widawati

Program Studi Ekonomi, Universitas Amikom Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2025,10-12

Revised 2025, 10-20

Accepted, 2025,10-24

Keywords:

IPM Perempuan,
Tenaga Profesional dan
Manajerial Perempuan,
Sumbangan Pendapatan

Perempuan,
Keterlibatan Perempuan di
Parlemen

ABSTRACT

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas hidup suatu negara, termasuk dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Meskipun IPM Indonesia terus meningkat setiap tahun, kesenjangan antara IPM laki-laki dan perempuan masih signifikan, mencerminkan ketimpangan gender dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tenaga profesional dan manajerial perempuan, sumbangan pendapatan perempuan, serta keterlibatan perempuan di parlemen terhadap IPM perempuan di Indonesia. Penelitian menggunakan data panel dari 34 provinsi selama periode 2016–2023, dengan pendekatan Random Effect Model (REM). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel tenaga profesional dan manajerial serta sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM perempuan. Sementara itu, keterlibatan perempuan di parlemen menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan. Temuan ini memperkuat pentingnya pemberdayaan perempuan, khususnya di sektor ekonomi dan profesional, untuk mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender.

The Human Development Index (HDI) is an important indicator in measuring a country's quality of life, encompassing dimensions of health, education, and a decent standard of living. Although Indonesia's HDI has continued to increase each year, the gap between male and female HDI remains significant, reflecting gender inequality in development. This study aims to analyze the influence of female professionals and managerial workers, women's income contribution, and women's involvement in parliament on the female HDI in Indonesia. The research uses panel data from 34 provinces over the 2016–2023 period, employing the Random Effect Model (REM) approach. The analysis results show that the variables of female professionals and managerial workers as well as women's income contribution have a positive and significant effect on the female HDI. Meanwhile, women's involvement in parliament has a positive but not significant effect. These findings reinforce the importance of women's empowerment, particularly in the economic and professional sectors, to improve women's quality of life and support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 5 on gender equality.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Anik Sri Widawati,

Program Studi Ekonomi, Universitas Amikom Yogyakarta

Jl. Ring Road Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY

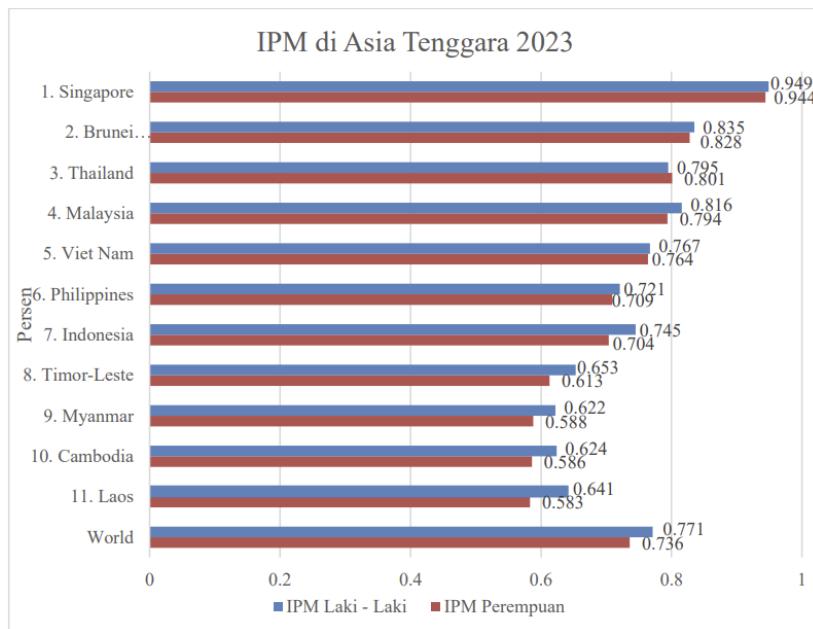
anik@amikom.ac.id

Pendahuluan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan Tujuan ke-5 berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan ini mendorong penghapusan diskriminasi, kekerasan, dan pernikahan dini, serta menjamin akses terhadap kesehatan reproduksi dan partisipasi setara bagi perempuan sia;(Hastuti et al., 2023; Bainus & Rachman, 2018; UN Women, 2020). Kualitas hidup perempuan sendiri mencakup dimensi fisik, mental, dan psikologis. Akses terhadap layanan kesehatan dan gizi termasuk dalam aspek fisik (Kawitri et al., 2020), sementara aspek mental dipengaruhi oleh stres dan beban ganda yang membutuhkan dukungan sosial serta lingkungan kerja yang adil (Putri et al., 2024).

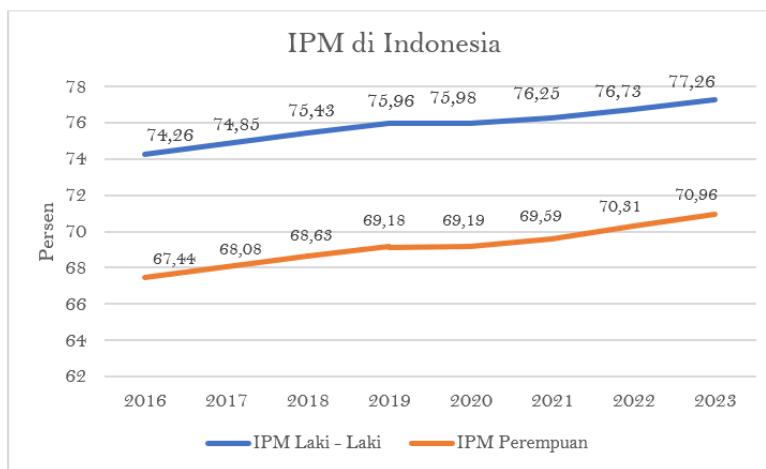
Kualitas hidup perempuan mencakup aspek fisik, mental, dan psikologis yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan (Fitriani & Handayani, 2018; Yulianti & Qomariah 2025) Meski IPM Indonesia meningkat, kesenjangan gender masih signifikan dengan kualitas hidup perempuan lebih rendah (Kemen PPPA, 2023) Pemberdayaan perempuan melalui akses dan kontrol sumber daya dapat

meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi (Kosiah et al., 2018) Namun, norma patriarki masih membatasi perempuan dan membuat mereka rentan terhadap ketidakadilan (Halizah & Faralita, 2023). Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan harus menjadi fokus strategi pembangunan berkelanjutan, mengingat posisi Indonesia yang masih tertinggal dibanding negara ASEAN lain (UNDP, 2023).



Gambar 1. IPM di Kawasan Asia Tenggara

Gambar di atas menunjukkan perkembangan kualitas hidup di Asia Tenggara yang tercermin melalui IPM tahun 2023. Indonesia menempati posisi ketujuh untuk IPM perempuan, dengan nilai sebesar 0,704, lebih rendah dibandingkan IPM laki-laki sebesar 0,745. Nilai ini juga masih berada di bawah rata-rata dunia dan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, yang memiliki IPM perempuan lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan masih lebarnya kesenjangan gender dalam pembangunan manusia di Indonesia, di mana IPM laki-laki unggul signifikan dibanding perempuan (UNDP, 2023).



Gambar 2. IPM di Indonesia

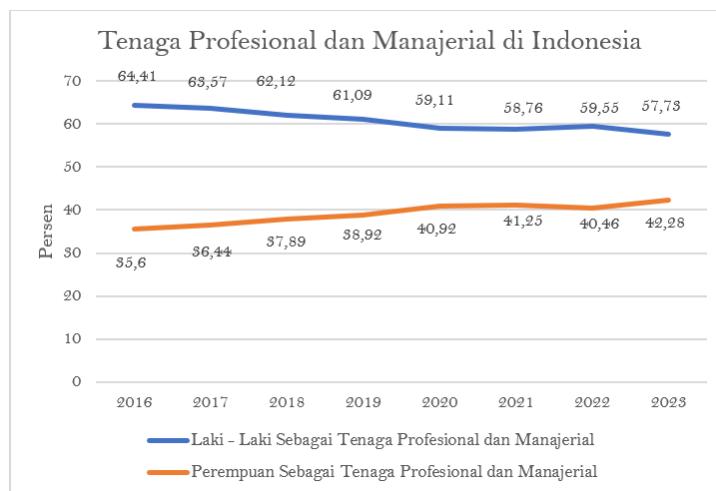
IPM perempuan di Indonesia meningkat dari 67,44% pada 2016 menjadi 70,96% pada 2023, namun masih lebih rendah dibandingkan IPM laki-laki yang naik dari 74,26% menjadi 77,26%. Hal ini menunjukkan ketimpangan kualitas hidup antara perempuan dan laki-laki. Rendahnya IPM perempuan disebabkan oleh diskriminasi, kesenjangan upah, rendahnya partisipasi ekonomi, dan budaya patriarki yang membatasi akses perempuan dalam pembangunan.



Rendahnya kualitas hidup perempuan yang tercermin dalam IPM dipengaruhi oleh hambatan struktural seperti diskriminasi di tempat kerja, ketimpangan upah, minimnya partisipasi di sektor formal dan posisi strategis, serta budaya patriarki. Hambatan ini muncul akibat kesenjangan gender dalam akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan publik (Nur, 2020). Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Faktor ekonomi dan politik berperan penting dalam proses ini, tidak hanya mencerminkan kesejahteraan individu, tetapi juga menunjukkan sejauh mana perempuan dilibatkan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh.

Faktor ekonomi yang mempengaruhi kualitas hidup perempuan direpresentasikan melalui dua variabel, yaitu tenaga profesional/manajerial perempuan dan kontribusi pendapatan perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan dinilai mampu mengurangi kesenjangan gender. Partisipasi perempuan dalam pekerjaan profesional dan manajerial mencerminkan pengakuan terhadap kemampuan mereka di dunia kerja, terutama dalam posisi yang memerlukan keterampilan teknis dan kepemimpinan (Rajagukguk, 2015).

Perempuan yang terlibat aktif di sektor ini memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan manusia dan ekonomi. Dengan menduduki posisi strategis yang menghasilkan pendapatan tinggi, perempuan dapat memenuhi kebutuhan dasar, hidup layak, dan meningkatkan kualitas hidupnya (Ladjin & Taliding, 2023). Kurnia et al., (2025) juga menemukan bahwa peningkatan jumlah perempuan di sektor profesional dan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi perempuan di pekerjaan berkualitas, semakin baik pula kualitas hidup mereka.

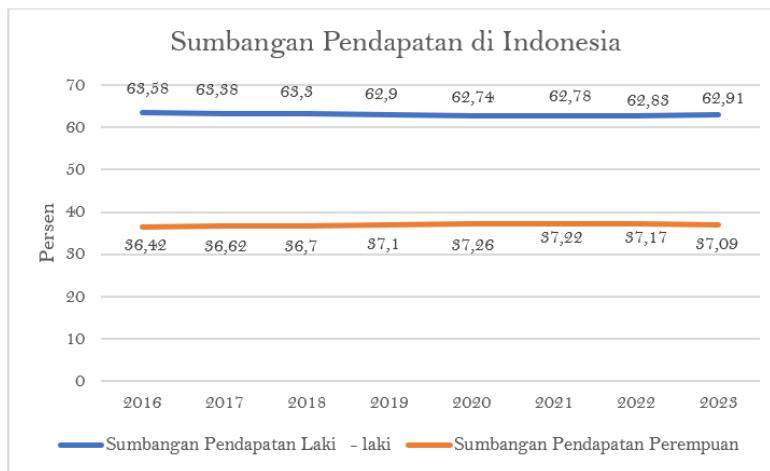


Gambar 3. Tenaga Profesional dan Manajerial

Data tahun 2016–2023 menunjukkan adanya tren peningkatan tenaga profesional dan manajerial perempuan di Indonesia, dari 35,6% menjadi 42,28%. Sebaliknya, angka pada laki-laki menurun dari 64,41% menjadi 57,73%. Meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, proporsi perempuan masih tertinggal jauh dibanding laki-laki, mengindikasikan adanya kesenjangan gender dalam sektor profesional (BPS, 2023).

Selain itu, sumbangan pendapatan perempuan juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup, karena tidak hanya menaikkan standar hidup, tetapi juga memperkuat akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan. Pendapatan yang lebih besar membuka peluang peningkatan modal, memperkuat kemandirian ekonomi, dan mendorong kesetaraan gender (Kemen PPPA, 2023).

Perempuan yang memiliki penghasilan sendiri cenderung mendapatkan lebih banyak sumber daya dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga (Putrie & Rahman, 2020) Penelitian (Kemen PPPA, 2023) menunjukkan bahwa semakin besar sumbangan pendapatan perempuan, semakin tinggi pula kualitas hidup mereka, menegaskan peran perempuan sebagai subjek aktif dan produktif dalam pembangunan ekonomi.

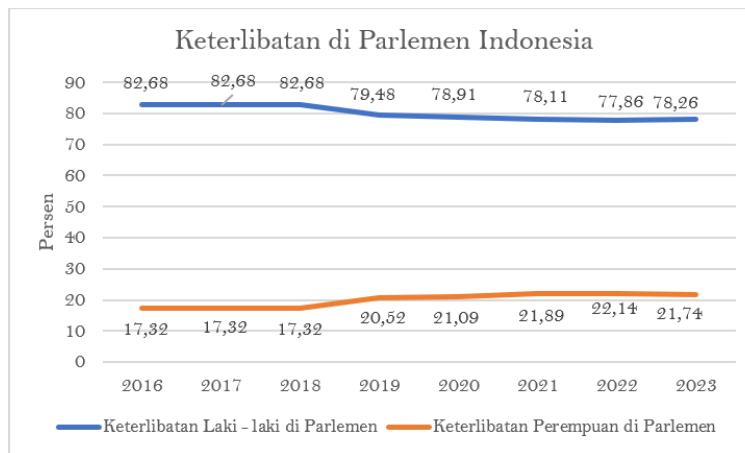


Gambar 4. Sumbangan Pendapatan

Data tahun 2016–2023 menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan di Indonesia mengalami peningkatan ringan dari 36,42% menjadi 37,09%, sementara kontribusi laki-laki menurun dari 63,58% menjadi 62,91%. Meski terjadi tren positif, kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan masih cukup besar (BPS, 2023).

Selain aspek ekonomi, faktor politik juga memengaruhi kualitas hidup perempuan, yang direpresentasikan melalui keterlibatan mereka di parlemen. Partisipasi perempuan dalam politik mencerminkan kekuasaan mereka dalam pengambilan keputusan publik dan berkontribusi pada kebijakan sosial-ekonomi yang berpihak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan (Utami & Arif, 2023).

Keterlibatan ini tidak hanya mencerminkan kesetaraan gender, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup perempuan secara langsung melalui kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Penelitian Abdurrahman & Tusianti (2021) menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di parlemen berdampak positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan, menunjukkan bahwa perempuan mampu memengaruhi ruang pengambilan keputusan yang selama ini didominasi laki-laki.



Gambar 5. Keterlibatan di Parlemen

Data tahun 2016–2023 menunjukkan tren peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen Indonesia, dari 17,32% menjadi 21,74%. Meski keterlibatan laki-laki menurun dari 82,68% menjadi 78,26%, perempuan masih belum setara dalam representasi politik, mencerminkan adanya kesenjangan gender yang signifikan di lembaga legislatif (BPS, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana faktor ekonomi dan politik, yakni keterlibatan perempuan dalam profesi profesional dan manajerial, sumbangan pendapatan, serta peran di parlemen mempengaruhi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan kelima yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.



Kajian Teori

Human Capital Theory (Teori Modal Manusia)

Human Capital Theory dikemukakan oleh Becker (1964) yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan keterampilan dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kualitas hidup individu. Modal manusia ini dapat diakumulasikan melalui pendidikan, pelatihan, migrasi, dan perawatan kesehatan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Atinna et al., 2024; Klein et al., 2018). Becker menekankan bahwa pengeluaran untuk pendidikan, pelatihan, dan kesehatan bukan sekedar konsumsi, tetapi investasi jangka panjang yang menghasilkan pengembalian nyata berupa peningkatan kemampuan, produktivitas, dan peluang kerja.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, peningkatan modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan memungkinkan perempuan untuk lebih mandiri secara ekonomi, memiliki akses lebih baik terhadap pekerjaan layak, serta berpartisipasi secara efektif dalam keputusan sosial, ekonomi, dan politik. Investasi ini menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Development Capability Approach

Capability Approach dikemukakan oleh Sen (1999) dalam *Development as Freedom*. Teori ini menekankan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kualitas hidup dan kebebasan yang dinikmati individu. Kebebasan menurut Sen terdiri dari dua aspek:

1. Aspek proses, yaitu kebebasan dalam menentukan pilihan tanpa paksaan.
2. Aspek kesempatan (capability), yaitu kemampuan nyata untuk mencapai *functionings* yang bervilai bagi kehidupan.

Sen menekankan bahwa pembangunan harus memperhatikan pendidikan, kesehatan, inklusi sosial, dan pemberdayaan, sehingga individu memiliki kapabilitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pemberdayaan perempuan, karena mendorong peningkatan kapasitas, partisipasi, dan penghapusan hambatan struktural, sehingga perempuan dapat berperan aktif dalam pembangunan manusia (Gumelar & Qomar, 2025; Susanto, 2025; Goodpal, 2017).

Dalam konteks pemberdayaan perempuan kapabilitas manusia memberikan kerangka yang kuat dalam menganalisis dan mendorong peran perempuan dalam pembangunan manusia. Pemberdayaan perempuan yang melibatkan peningkatan kapasitas, partisipasi dan penghapusan hambatan struktural menjadi sarana utama dalam memperluas kapabilitas perempuan.

Feminism Theory (Teori Feminisme)

Menurut Tuttle (1986), istilah *feminism* berasal dari bahasa Latin *femina (woman)* dan awalnya merujuk pada teori persamaan seksual dan gerakan hak perempuan. Teori feminism menekankan pentingnya memahami hubungan antara perempuan dan laki-laki di semua bidang kehidupan, dengan fokus pada konflik gender, ketidakadilan, serta struktur sosial patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan. Beberapa aliran feminism lainnya:

1. Feminisme Liberal, menekankan kesetaraan hak dan peluang dalam pendidikan, pekerjaan, dan hukum.
2. Feminisme Sosialis, memperjuangkan penghapusan pembagian gender dan kelas yang menindas perempuan, termasuk kontrol laki-laki atas harta dan institusi perkawinan.
3. Feminisme Postmodern, menolak pemahaman absolut dan otoritas tunggal, serta mengkritik universalitas pengetahuan ilmiah dan sejarah.
4. Secara umum, feminism tidak hanya mengkritik ketidakadilan sosial dan budaya, tetapi juga mendorong transformasi struktural agar perempuan memiliki kontrol lebih besar terhadap kehidupannya (Wibowo et al., 2022).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan

IPM Perempuan adalah indikator komposit untuk menilai kualitas hidup perempuan di suatu wilayah, sekaligus menganalisis kesenjangan gender dan efektivitas kebijakan pembangunan yang responsif gender (BPS, 2023). Menurut Christyadi et al. (2020) IPM mengukur tingkat pembangunan manusia dengan menilai hasil di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Menurut BPS (2023) beberapa manfaat dari indeks pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

1. Sebagai indikator untuk menilai keberhasilan upaya meningkatkan standar hidup
2. Sebagai ukuran kemajuan atau tingkat perkembangan suatu daerah atau negara;
3. Di Indonesia, IPM digunakan sebagai salah satu indikator kunci dana umum (DAU) serta sebagai strategi data karena merupakan ukuran efisiensi kerja pemerintah.

Menurut BPS (2023) rumus perhitungan Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

$$IPM = (I_{health} \times I_{education} \times I_{income}) \frac{1}{3} \times 100$$

Keterangan :

I_{PM} : Indeks Pembangunan Manusia

I_{health} : Indeks Kesehatan

$I_{education}$: Indeks Pendidikan

I_{income} : Indeks Standar Hidup

Teori Pembangunan Manusia dikemukakan Haq (1995), yang menekankan bahwa pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan: kebebasan politik, partisipasi sosial, pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Pendekatan ini menekankan pembangunan menyeluruh yang mencakup pertumbuhan ekonomi, investasi sosial, pemberdayaan masyarakat, penyediaan kebutuhan dasar, jaring pengaman sosial, serta kebebasan politik dan budaya.

Sen (1999) menekankan bahwa pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan nyata yang dinikmati individu, yang bergantung pada faktor sosial ekonomi, seperti akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan partisipasi politik. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna.

Tenaga Profesional dan Manajerial Perempuan

Tenaga profesional dan manajerial perempuan merupakan perempuan yang menduduki posisi strategis dengan tanggung jawab profesional maupun manajerial, termasuk jabatan struktural (BPS, 2023). Peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ini menunjukkan kemajuan akses terhadap pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pendidikan tinggi, sekaligus mencerminkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkontribusi pada peningkatan IPM perempuan.

Kurnia et al. (2025) menemukan bahwa tenaga profesional dan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM perempuan di Indonesia. Temuan serupa dikemukakan oleh Ayun & Mukhlis (2022) bahwa partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional berpengaruh terhadap IPM di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Tenaga profesional dan manajerial perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM perempuan di Indonesia.

Sumbangan Pendapatan Perempuan

Sumbangan pendapatan perempuan menggambarkan tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan (BPS, 2023). Peningkatan sumbangan ini menunjukkan peran aktif perempuan dalam aktivitas ekonomi serta kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga dan perekonomian nasional. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup, sebagaimana tercermin dalam IPM perempuan.

Yunara et al. (2023) menemukan bahwa sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Barat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar sumbangan pendapatan perempuan, semakin tinggi pula kualitas hidup yang tercermin dalam IPM perempuan. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM perempuan di Indonesia.

Keterlibatan Perempuan di Parlemen

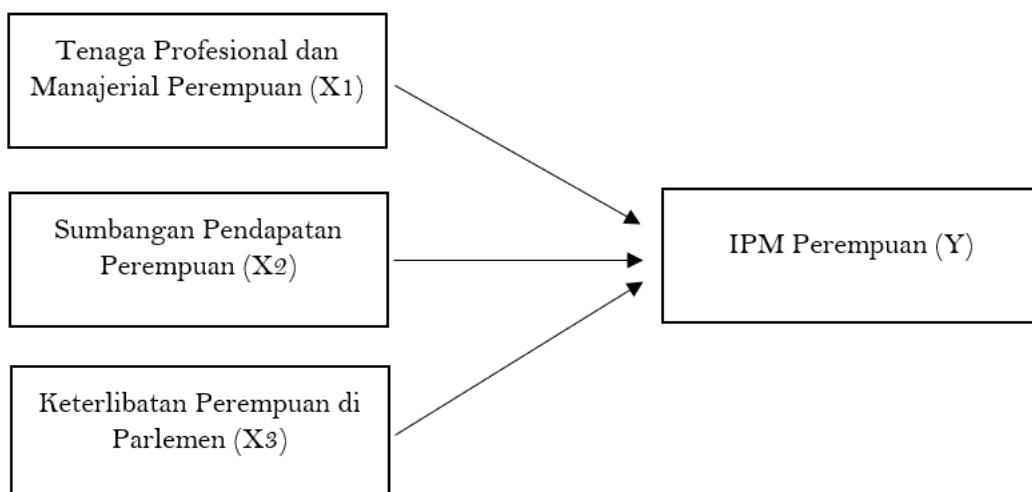


Keterlibatan perempuan di parlemen merujuk pada partisipasi aktif perempuan dalam lembaga legislatif, mencakup peran dalam proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan politik (BPS, 2023). Peningkatan keterlibatan ini menunjukkan bahwa perempuan memperoleh ruang dalam perumusan kebijakan serta memperjuangkan isu-isu gender. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan pemberdayaan politik perempuan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, sebagaimana tercermin dalam IPM perempuan.

Abdurrahman & Tusianti (2021) menemukan bahwa keterlibatan perempuan di parlemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM perempuan di Indonesia. Artinya, semakin tinggi keterlibatan perempuan dalam parlemen, semakin baik pula kualitas hidup yang tercermin dalam IPM perempuan. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Keterlibatan perempuan di parlemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM perempuan di Indonesia.

Berdasarkan kajian teori dan hipotesis yang telah diuraikan, kerangka kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai rangkaian arah penelitian yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut:



Gambar 6. Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah kondisi perempuan di Indonesia, dianalisis menggunakan data panel kombinasi time series (2016–2023) dan cross section (34 provinsi), dengan total 272 observasi. Data diperoleh dari BPS, UNDP, dan sumber lain yang relevan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM Perempuan, sedangkan variabel independennya meliputi Tenaga Profesional dan Manajerial Perempuan (TPMP), Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP), dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP). Definisi Operasional seluruh variabel penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Penjelasan	Satuan	Sumber
IPM Perempuan	Indikator komposit yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan kualitas hidup perempuan di suatu wilayah	%	BPS
Tenaga Profesional dan Manajerial Perempuan	Perempuan yang memiliki keahlian khusus dari pendidikan atau pelatihan, serta menduduki posisi kepemimpinan atau pengambilan keputusan dalam organisasi, lembaga, atau perusahaan.	%	BPS
Sumbangan Pendapatan	Kontribusi atau bagian dari	%	BPS

Perempuan	pendapatan yang diberikan secara perempuan terhadap total pendapatan rumah tangga		
Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Ukuran partisipasi atau representasi perempuan dalam lembaga legislatif (parlemen)	%	BPS

Penelitian ini menggunakan software E-Views 10 untuk mengolah data panel secara efisien. Pemilihan model regresi dilakukan dengan uji Chow, Lagrange Multiplier, dan Hausman untuk menentukan model Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect terbaik. Analisis juga meliputi uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2), serta uji asumsi klasik seperti normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas menggunakan metode OLS.

Hasil dan Pembahasan

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Prob(Jarque Bera)	A	Kesimpulan
0,080771	0,05	Normal

Sumber : Output Eviews 10, 2025

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan residual model regresi mengikuti distribusi normal, yang penting untuk validitas uji signifikansi. Berdasarkan uji Jarque-Bera, p-value sebesar $0,080771 > 0,05$, sehingga residual dianggap berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Prob.	A	Kesimpulan
C	0,5393		
TPMP	0,5694		
SPP	0,8578	0,05	Tidak ada Heteroskedastisitas
KPP	0,6642		

Sumber : Output Eviews 10, 2025

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glesjer dilakukan untuk memeriksa apakah varians residual model regresi konstan. Hasil menunjukkan semua nilai p-value variabel bebas lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model.

Uji Multikolininearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolininearitas

	TPMP	SPP	KPP
TPMP	1	0,126537	0,322604
SPP	0,126537	1	0,016655
KPP	0,322604	0,016655	1

Sumber: Output Eviews 10, 2025

Uji Multikolininearitas untuk memastikan tidak ada korelasi tinggi antar variabel independen. Hasil menunjukkan semua korelasi di bawah 0,85, sehingga model bebas dari multikolininearitas.

Uji Autokorelasi

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

Prob	A	Kesimpulan
0,2681	0,05	Tidak Ada Autokorelasi

Sumber : Output Eviews 10, 2025

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengecek hubungan antar residual dalam model regresi dari waktu ke waktu. Berdasarkan uji Breusch–Godfrey, nilai probabilitas sebesar 0,2681 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa model regresi bebas dari gejala autokorelasi.

2. Regresi Linear Data Panel

Pengujian dilakukan untuk memilih model regresi terbaik dalam menggambarkan hubungan antar variabel. Random Effect Model dipilih berdasarkan hasil uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil uji penelitian selengkapnya dijabarkan berikut ini:

Tabel 6. Hasil Regresi Random Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	49,08830	2,221500	22,09691	0,0000
TPMP	0,214775	0,020167	10,64972	0,0000
SPP	0,303689	0,064805	4,686177	0,0000
KPP	0,011702	0,020608	0,567843	0,5706
R-square	Adjs.R-square	F-statistik	Prob.(F-stat)	DW-stat
0,408070	0,401444	61,58536	0,000000	1,025404

Sumber : Output Eviews 10, 2025

Persamaan regresi linear berganda dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

$$IPMP = 49,08830 + 0,214775TPMP + 0,303689SPP - 0,011702KPP + e$$

Model persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai koefisien konstanta sebesar 49,08830 memperlihatkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai IPM Perempuan diperkirakan sebesar 49,08830.
- Koefisien Tenaga Profesional dan Manajerial Perempuan sebesar 0,214775 dengan probabilitas 0,0000 ($< 0,05$) memperlihatkan bahwa setiap kenaikan 1% pada variabel ini akan meningkatkan IPM Perempuan sebesar 0,214775%.
- Koefisien Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 0,303689 dengan probabilitas 0,0000 ($< 0,05$) memperlihatkan bahwa setiap kenaikan 1% pada variabel ini akan meningkatkan IPM Perempuan sebesar 0,303689%.
- Koefisien Keterlibatan Perempuan di Parlemen sebesar 0,011702 dengan nilai probabilitas 0,5706 ($> 0,05$) memperlihatkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM Perempuan. Artinya, peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 1% tidak menyebabkan perubahan signifikan pada IPM Perempuan.

3. Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan hasil sebagai berikut:

- Variabel Tenaga Profesional dan Manajerial Perempuan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM perempuan ($p = 0,0000 < 0,05$). Artinya, peningkatan jumlah tenaga profesional dan manajerial perempuan akan mendorong peningkatan IPM Perempuan.
- Sumbangan Pendapatan Perempuan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM perempuan ($p = 0,0000 < 0,05$). Artinya, semakin besar kontribusi pendapatan perempuan, semakin tinggi pula IPM Perempuan.
- Keterlibatan Perempuan di Parlemen tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM perempuan ($p = 0,5706 > 0,05$). Artinya, peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen tidak berdampak nyata terhadap peningkatan IPM Perempuan.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji F memperlihatkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM perempuan, dengan nilai F sebesar 61,58536 dan p-value 0,000000 (<0,05).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2 -squared) sebesar 0,408070 menunjukkan bahwa 40% variasi IPM perempuan dijelaskan oleh variabel dalam model, sementara 60% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Pembahasan

Pengaruh Tenaga Profesional dan Manajerial Terhadap IPM Perempuan Di Indonesia

Tenaga Profesional dan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi perempuan di posisi profesional dan manajerial dapat mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan. Data BPS (2023) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa harapan lama sekolah perempuan (13,33 tahun) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (12,98 tahun).

Selain itu, persentase perempuan usia 7–23 tahun yang masih bersekolah dan lulus perguruan tinggi juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki, baik di perkotaan maupun pedesaan (BPS, 2024; Detikcom, 2024).. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan perempuan mengakses pekerjaan dengan pendapatan lebih baik, yang berdampak positif pada kesejahteraan dan IPM perempuan.

Temuan ini sejalan dengan teori Human Capital dan Ekonomi Endogen yang menekankan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan peran perempuan dalam tenaga profesional dan manajerial merupakan faktor kunci dalam mendorong pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Pengaruh Sumbangan Pendapatan Perempuan Terhadap IPM Perempuan Di Indonesia

Sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM perempuan, setiap kenaikan 1% dalam kontribusi pendapatan perempuan dapat meningkatkan IPM perempuan sebesar 0,303689%. Data BPS (2022) mencatat kontribusi perempuan sekitar 37,17% dari pendapatan rumah tangga, didukung oleh kewirausahaan, pendidikan, dan akses pembiayaan. Perempuan juga mendominasi sektor UMKM yang menyumbang 60% PDB Indonesia (Katadata, 2021).

Teori Keynes menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan mendorong konsumsi dan kesejahteraan, sementara teori feminism liberal menekankan pentingnya akses ekonomi yang setara bagi perempuan dalam pembangunan sosial (MPR, 2024; Turrtle, 2019). Partisipasi perempuan dalam ekonomi dan kontribusi pendapatan keluarga meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi serta akses layanan kesehatan dan pendidikan, yang berdampak positif pada kualitas hidup perempuan dan pembangunan, tercermin dalam IPM. Penelitian Yunara et al. mendukung temuan ini, menunjukkan pengaruh positif signifikan sumbangsih pendapatan perempuan terhadap IPM di Sumatra Barat, memperkuat sumber daya manusia dan pembangunan perempuan secara menyeluruh.

Pengaruh Keterlibatan Perempuan Di Parlemen Terhadap IPM Perempuan Di Indonesia

Keterlibatan perempuan di parlemen menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM perempuan, karena meskipun mereka menempati 22,46% kursi, dominasi laki-laki dan terbatasnya akses pada pengambilan keputusan membatasi peran mereka. Sikap diskriminatif dan rendahnya dukungan politik membatasi posisi strategis perempuan, seperti tidak adanya pimpinan perempuan di Komisi VIII DPR yang mengurus isu perempuan dan anak (KPU, 2024; Kompas, 2024).. Sejarah kekerasan terhadap perempuan dan minimnya representasi politik menunjukkan suara perempuan masih kurang didengar, sehingga peningkatan kuantitas belum berdampak signifikan pada kebijakan yang mendukung IPM perempuan (Tempo, 2025).

Temuan ini sesuai dengan teori *Capability Approach* Amartya Sen, bahwa pembangunan diukur dari kemampuan individu menjalani hidup bermakna, bukan sekadar pendapatan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan di parlemen harus diukur dari kemampuan memperjuangkan kebijakan pro-



perempuan, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Hasil serupa ditemukan Yunara et al. (2023) di Sumatra Barat, di mana pengaruh perempuan di parlemen terhadap pembangunan manusia juga positif tapi tidak signifikan, akibat pengaruh substantif yang terbatas dan dominasi politik patriarkal.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di bidang profesional dan manajerial berperan penting dalam meningkatkan IPM perempuan di Indonesia. Hal ini karena perempuan dengan pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi mampu mendorong kualitas hidup mereka secara signifikan. Selain itu, sumbangsih pendapatan perempuan juga berperan penting. Semakin besar kontribusi pendapatan perempuan, semakin meningkat pula kualitas hidup mereka. Hal ini didukung oleh partisipasi perempuan dalam kewirausahaan dan kemudahan akses pembiayaan yang semakin baik. Namun, keterlibatan perempuan di parlemen meskipun positif, belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM perempuan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, adanya sikap diskriminatif, dan minimnya posisi perempuan dalam posisi kepemimpinan strategis di parlemen. Sehingga, dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan masih terbatas.

Pemerintah dan sektor swasta perlu memperkuat kebijakan afirmasi dengan menyediakan pelatihan dan menciptakan lingkungan kerja yang adil serta inklusif. Selain itu, dukungan bagi pekerja dan wirausaha perempuan harus ditingkatkan agar pendapatan mereka dapat meningkat secara menyeluruh. Di sisi lain, perempuan di parlemen memerlukan penguatan kapasitas dan dukungan politik agar mampu memperjuangkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada perempuan.

Referensi

- Abdurrahman, A., & Tusianti, E. (2021). Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 204–219. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.13>
- Ayun, Q., & Mukhlis, I. (2022). Women's Contribution As Professionals And Women Entrepreneurs To The Women's Human Development Index (IPM) In Java Island. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(9), 1101–1120.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Sustainable Development Goals. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n1.1>
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital*. The University of Chicago Press.
- BPS. (2022). *Perempuan Dan Laki - Laki 2022*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/16/a37fb493455d772274cc2314/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2022.html>
- BPS. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia*. <https://www.bps.go.id/publication/2024/05/13/8f77e73a66a6f484c655985a/indeks-pembangunan-manusia-2023.html>
- BPS. (2023). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen*. <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen>
- BPS. (2023). *Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan Manajerial*. <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>
- BPS. (2023). *Sumbangan Pendapatan Perempuan*. <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/NDY3IzI=/sumbangan-pendapatan-perempuan.html>
- BPS. (2024). *Perempuan dan laki- laki di indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id/publication/2024/12/20/c9402c25d61aaa2ad5945d3a/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2024.html>
- Christyadi, Satriya, & Goejantoro. (2020). Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menggunakan Analisis Regresi Probit (Studi Kasus: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Kalimantan Tahun 2017). *Jurnal EKSPONENSIAL*, 11(2). <https://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/exponensial/article/download/662/298/>

- Detikcom. (2024). *Perempuan Tak Boleh Sekolah Tinggi? BPS: Lulusan Perguruan Tinggi Lebih Banyak Cewek.* <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7838906/perempuan-tak-boleh-sekolah-tinggi-bps-lulusan-perguruan-tinggi-lebih-banyak-cewek>
- Fitriani, A., & Handayani, A. (2018). *Hubungan Antara Beban Subjektif Dengan Kualitas Hidup Pendamping (Caregiver) Pasien Skizofernia.* 13(1), 13–24.
- Gumelar, S., & Qomar, S. (2025). Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2). <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.149>
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32.
- Hastuti, N. D., Suranti, S., & Azizah, L. S. (2023). Kajian Disparitas Perempuan dan Pembangunan Kota Surakarta. *Pusat Kajian Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta*, 2(1), 43–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.58684/jbs.v2i1.26>
- Katadata. (2021). *Kontribusi Perempuan Ke Ekonomi Indonesia Bisa Rp. 1.957 T pada Tahun 2025.* <https://katadata.co.id/finansial/makro/607ff59a84140/kontribusi-perempuan-ke-ekonomi-indonesia-bisa-rp-1957-t-pada-2025>
- Kawitri, A. Z., Listiyandini, R. A., & Rahmatika, R. (2020). Peran Self-Compassion terhadap Dimensi-dimensi Kualitas Hidup Kesehatan pada Remaja Panti Asuhan. *Psypathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), 01–18. <https://doi.org/10.15575/psy.v7i1.4406>
- Kemen PPPA. (2023). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2023* (S. Angraini, A. P. Bungsu, & Nurhayati, Eds.). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
- Kompas. (2024). *Keterwakilan Perempuan Level DPR RI di Bawah Rata-rata Dunia.* <https://lestarikompas.com/read/2024/04/10/140000486/keterwakilan-perempuan-level-dpr-ri-di-bawah-rata-rata-dunia?page=all>
- Kosiah, Nurjana, R., & Artis, D. (2018). Analisis Pengaruh Investasi dan Kesempatan Kerja Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. *Jurnal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 6(3), 145–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pim.v6i3.7312>
- KPU. (2024). *Keterwakilan 30% Perempuan untuk Perbaikan Demokrasi di Indonesia.* <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10893/keterwakilan-30-perempuan-untuk-perbaikan-demokrasi-di-indonesia>
- Kurnia, R., Eliza, A., & Supriyaningsih, O. (2025). Analisis Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Politik Terhadap IPM Perempuan di Indonesia Tahun 2015-2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(2), 4543–4552.* <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7417>
- Ladjin, N., & Taliding, A. (2023). Analisis Produktivitas Perempuan di Kabupaten Banggai. *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, 3(2), 611–616. <https://doi.org/https://doi.org/10.58191/jomel.v3i2.146>
- MPR. (2024). *Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Bagian Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.* <https://www.mpr.go.id/berita/lestari-moerdijat-peningkatan-kesejahteraan-keluargahttps://www.mpr.go.id/berita/lestari-moerdijat-peningkatan-kesejahteraan-keluarga>
- Nur. (2020). Pemberdayaan Perempuan untuk kesetaraan dan Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. *Jurnal Gender Dan Anak*, 10(1), 99–111. <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/annisa/article/view/388/299>
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematik Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 17. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>
- Putrie, & Rahman. (2020). Analisis dan Pemodelan Pendapatan Pekerja Perempuan di Indonesia Menggunakan Data Panel. *Seminar Nasional Official Statistics 2020*, 1, 1269–1276. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.688>
- Rajagukguk, W. (2015). Determinan Perempuan Menduduki Posisi Tenaga Profesional di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 10(1), 173–189.
- Sen, A. (1999). *Development As Freedom.* <https://archive.org/details/amartya-kumar-sen-development-as-freedom-alfred-a.-knopf-inc.-2000/mode/2up>



- Tempo. (2024). *Formappi Kritik Ketiadaan Pimpinan Perempuan di Komisi VIII Yang Membidangi Urusan Perempuan dan Anak*. <https://www.tempo.co/politik/formappi-kritik-ketiadaan-pimpinan-perempuan-di-komisi-viii-yang-membidangi-urusan-perempuan-dan-anak-1159766>
- UN Women. (2020). *Perempuan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Asean*.
- UNDP. (2023). *Human Development*. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24>
- Utami, T. H., & Arif, M. (2023). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya622>
- Wibowo, G. A., Chairuddin, Rahman, A., & Riyandi. (2022). Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 121–127.
- Yulianti, Y., & Qomariah, S. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Ilmu Pengetahuan. *Bahasa Dan Pendidikan*, 5(1), 190–200. <https://doi.org/10.55606/cendikia.v5i1.3512>
- Yunara, E., Yeni, I., & Irfan, M. (2023). Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik Terhadap Pembangunan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 79–88. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index>